

**PENGATURAN HARTA GUNA KAYA DALAM  
PERKAWINAN MESALIN TIKEH PADA MASYARAKAT  
BALI**

**(Studi Kasus Di Desa Selemadeg Kecamatan Selemadeg  
Kabupaten Tabanan, Bali)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Menyelesaikan  
Program Studi Magister Kenotariatan  
Universitas Diponegoro**



**Disusun Oleh :  
IDA AYU DWI LESTARI, SH.  
B4B001139**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2003**

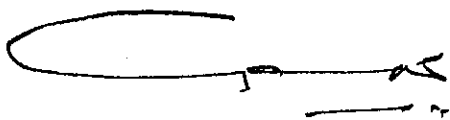
**TESIS**

**PENGATURAN HARTA GUNA KAYA DALAM PERKAWINAN  
MESALIN TIKEH PADA MASYARAKAT BALI  
(Studi Kasus Di Desa Selemadeg Kecamatan Selemadeg  
Kabupaten Tabanan, Bali)**

Disusun Oleh :  
**IDA AYU DWI LESTARI, SH.**  
B4B001139

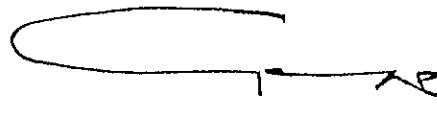
Menyetujui

Pembimbing



(Prof. IGN. Sugangga, SH.)

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan



(Prof. IGN. Sugangga, SH.)

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft.	2361/T/mot/c.1
Tgl.	6 maret 2012

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan sebenarnya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Hormat saya,  
Penulis

(Ida Ayu Dwi Lestari,SH.)

## ABSTRAKSI

Bali adalah salah satu daerah yang hukum adatnya masih sangat kuat berpengaruh dan dapat diterima oleh masyarakat Bali, dimana semua itu berpangkal pada kebudayaan masyarakat Bali dan banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur religius. Hukum adat di Bali hidup secara berdampingan, saling mengisi serta saling melengkapi dengan agama. Mayoritas masyarakat di Bali adalah beragama Hindhu. Secara konkrit hal ini terlihat dari tata cara perkawinannya yang lebih banyak dikaitkan dengan ritual-ritual keagamaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada masyarakat Bali yang sistem garis keturunan dan hubungan kekerabatannya berpegang pada prinsip patrilineal (*purusa*), yaitu perkawinan yang mempertahankan sanak saudara berhakurum kebapakan. Apabila terjadi suatu perkawinan, maka mempelai wanita masuk ke dalam golongan keluarga suaminya dan keturunannya akan meneruskan sistem kekeluargaan dari suaminya.

Pada masyarakat Bali dikenal pula suatu perkawinan yang disebut dengan *Nganten Mesalin Tikeh*, dimana perkawinan ini terjadi apabila seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian si janda akan dinikahi oleh saudara laki-laki almarhum suaminya.

Adapun tata cara pelaksanaan perkawinan mengganti (*Nganten Mesalin Tikeh*) ini tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan perkawinan pada umumnya yang dilaksanakan oleh masyarakat Bali, hanya saja didalam perkawinan mengganti upacaranya tidak selengkap pada perkawinan yang pertama dan pada perkawinan mengganti dilakukan suatu upacara untuk memohon ijin kepada almarhum suami si janda, bahwa jandanya telah dinikahi oleh saudara laki-lakinya. Upacaranya disebut dengan upacara *Mapegat Sot*.

Mengenai harta perkawinan yang ditinggalkan khususnya terhadap harta *Guna Kaya*, yang paling berhak untuk mewarisi harta tersebut adalah anak laki-laki yang lahir dari perkawinan yang pertama, sedangkan anak perempuan bukan sebagai ahli waris karena ia akan masuk ke dalam keluarga suaminya sesuai dengan sistem perkawinan yang dianut oleh masyarakat Bali, yaitu sistem patrilineal. Janda yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya hanya berhak untuk menikmati dan berkewajiban untuk mengurus harta perkawinan tersebut. Demikian pula terhadap suaminya yang kedua ini kedudukannya sama dengan si janda dimana dia hanya berhak menikmati harta peninggalan tersebut.

## ABSTRACT

Bali is one of area which its customary law still very strong have an effect on and acceptable by society Bali, where all that jetty of culture socialize bali and a lot of influenced by element - religion element. customary law in bali live adjacently, each other fill and also each other provide with religion. majority socialize in bali is believe in hindhu. Concretely this matter is seen from procedures of his marriage is which is more amount related to by ritual - religious ritual.

Go together the mentioned, society of bali which system of lineage and link of its consanguinity hold on to principle patrilineal (*Purusa*), that is marriage maintaining folks punish fatherhood. in the event of a[n marriage hence mempelai of incoming woman into faction family of her husband and her clan will continue system of familiarity from her husband.

At society of bali recognized also an marriage is so-called by *Nganten Mesalin Tikeh*, where this marriage is happened if a wife omitted death by her husband, later; then the widow will be married by man you - man defunct of her husband.

As for substitute marriage execution procedures (*nganten mesalin tikeh*) this do not far differ from marriage execution of generally executed by society bali, just only in substitute marriage, substitute ceremony, its ceremony do not as complete as first marriage and at substitute marriage done by an ceremony to request permission to husband defunct of the widow, that her widow have been married by his brother. this ceremony is called *mapegat sot*.

Hitting estae of left marriage, specially to estae "utilize rich", what most is entitled to inherit the estae man child - man which born from first marriage, while daughter of non as heir because he will enter into family of husband as according to system of marriage embraced by society bali, that is system patrilineal. widow left by defunct of her husband only entitled to enjoy and is obliged to manage estae of the marriage. that way also to her husband secondly this domicile it is equal to the widow of where he/she only entitled to enjoy estae of the ommission.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) yang telah memberikan petunjuk serta bimbingannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul Pengaturan Harta Guna Kaya Dalam Perkawinan Mesalin Tikeh Pada Masyarakat Bali (Studi Kasus Di Desa Selemadeg, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Bali).

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang.

Sesuai dengan kenyataan yang ada, bahwa dalam rangka penyusunan tesis ini penulis tidak terlepas dari bantuan pengarahan serta bimbingan dari pihak lain. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, baik bantuan dalam rangka penelitian dan penyelesaian tesis ini maupun dalam penyelesaian teori-teori di bangku kuliah, terutama yang terhormat :

- 1 Bapak Prof. IGN. Sugangga,SH., selaku ketua program Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang, dan selaku dosen pembimbing dalam tesis ini yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian hingga selesainya tesis ini.
- 2 Bapak R. Suharto,SH.M.Hum., selaku sekretaris program Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semaraang, yang memberikan kesempatan dan kepercayaan dalam penulisan tesis ini.

- 3 Team Penguji yang telah memberikan kritik dan saran dalam penyelesaian tesis ini.
- 4 Kepala perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang yang turut pula memberikan bantuan dalam penyelesaian tesis ini.
- 5 Ida Pedanda Gede Manu, selaku pemuka agama yang turut pula memberikan saran dan bantuan penyajian data dalam penyelesaian tesis ini.
- 6 Ibu Juwita Arsawati,SH. M.Hum., yang telah memberikan dorongan moril dalam penyelesaian tesis ini.
- 7 Aji, ibu dan niang yang telah begitu banyak membantu dengan doa hingga selesainya tesis ini.
- 8 Nanik, Oka, dan segenap keluarga di Bali yang telah begitu banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini.
- 9 Rini, atas bantuan dan dorongannya selama penyelesaian tesis ini
- 10 Indah dan Mas Hari atas bantuannya selama di Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini sangat jauh dari sempurna sehingga kritik dan saran yang menunjang sangat penulis harapkan untuk kesempurnaannya.

Terima kasih.

Hormat Saya,

Penulis

"*Īnanavaneva puruṣaḥ saṃyuktah  
paraya dhiya udayastamanajno  
hi na corali na hrayati*"  
(*Sarasamuscaya, cloka 500 hal. 339-340*)

*Artinya :*

*Jika ada orang sadar akan keadaan yang hakiki  
itu, orang yang demikian itu dinamai orang yang  
budiman, makin tinggi ilmu orang yang budiman  
itu, makin tidak dilekati kesenangan dan kesedihan  
dalam pikirannya.*

*Karya ini kupersembahkan kepada :*

*Suamiku tercinta 'Gusdhe' buah hati kami  
tersayang 'Gus Raka'  
Doa dan dukungan kalian menjadi semangatku.*



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	ii
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	iii
<b>ABSTRAKSI .....</b>	iv
<b>ABSTRAC.....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vi
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ix
<b>DAFTAR ISTILAH .....</b>	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	1
I. Latar Belakang Masalah .....	1
II. Perumusan masalah .....	7
III. Tujuan Penelitian .....	8
IV. Manfaat Penelitian .....	8
V. Sistematika Penelitian .....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	11
A. Pengertian dan Sahnya Perkawinan .....	11
A.1. Pengertian Perkawinan .....	11
A.2. Sahnya Perkawinan .....	15
B. Bentuk-bentuk Perkawinan menurut Hukum Adat .....	17
C. Pengertian dan Tujuan Perkawinan Mengganti .....	22
C.1. Pengertian Perkawinan Mengganti .....	22
C.2. Tujuan Perkawinan Mengganti .....	23
D. Macam-macam Perkawinan Mengganti .....	24
<b>BAB III: METODE PENELITIAN .....</b>	34
A. Metode Pendekatan .....	35
B. Spesifikasi Penelitian .....	36
C. Populasi dan Penentuan Sampel .....	36
D. Teknik Pengumpulan Data .....	39

E. Analisis Data .....	41
F. Lokasi Penelitian .....	41
G. Jadwal Waktu Penelitian dan Penulisan .....	41
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
B. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Mesalin Tikeh Pada Masyarakat Desa Adat Selemadeg .....	51
C. Pengaturan Harta Guna Kaya Pada Perkawinan Mesalin Tikeh Pada Masyarakat Desa Adat Selemadeg .....	59
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran-saran .....	65

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR ISTILAH**

1. Adat ( Desa Adat) :  
Desa di Bali yang mempunyai wewenang/kekuasaan dibidang Adat dan Agama.
2. Administrasi (Desa Administrasi) :  
Desa di Bali yang merupakan unsur terkecil/terbawah dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia.
3. Klian Adat, Klian Desa, Bendesa :  
Kepala Desa Adat
4. Perbekel :  
Kepala Desa Administrasi.
5. Druwe Gabro :  
Harta yang diperoleh dalam perkawinan dan lebih-lebih yang diperoleh suami-istri dengan cucuran keringat bersama.
6. Guna Kaya :  
Harta yang diperoleh masing-masing dari suami atau istri atas cucuran keringat masing-masing sebelum masuk jenjang perkawinan.
7. Mewidi Wedana :  
Upacara pengesahan perkawinan di Bali, disebut juga Memeragat, di daerah lain di Bali ada yang menyebut dengan Mesakapan atau Mekalan-kalan.
8. Mepegat Sot :  
Upacara pemberitahuan kepada almarhum suami, bahwa istrinya telah dinikahi oleh saudara laki-laki almarhum suami si janda.

9. Sentana Rejeg :

Anak perempuan, biasanya anak perempuan tunggal yang oleh orang tuanya ditetapkan sebagai anak laki-laki, dan anak perempuan itu nantinya akan meneruskan keturunan dari pihak ayahnya.

10. Nganten Mesalin Tikeh :

Perkawinan seorang janda dengan saudara laki-laki almarhum suaminya.

11. Balu :

Sebutan janda yang ditinggal mati oleh suaminya,

12. Purusa :

Sebutan dari menarik garis keturunan/penerus keturunan ada pada pihak laki-laki.

13. Wiwaha :

Nama lain dari perkawinan.

14. Mepamit :

Mohon diri.

15. Sanggah Kemulan :

Suatu tempat pemujaan Umat Hindhu kepada para leluhurnya.

16. Bale Gede :

Suatu bangunan yang biasanya terletak disebelah Selatan dalam suatu pekarangan rumah dan digunakan sebagai tempat pelaksanaan upacara adat.

17. Jiwa Dana :

Pemberian dengan dasar tulus ikhlas dari orang tua kepada anaknya ataaau anak angkatnya sewaktu masih hidup berkumpul yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh ahli waris.

Jiwa Dana dapat dibawa masuk ke jenjang perkawinan.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak pada garis katulistiwa dimana penduduk yang menempatinnya beraneka ragam adat budaya dan hukum adatnya. Ada masyarakat yang lebih banyak dipengaruhi tradisi polinesia, ada yang lebih banyak dipengaruhi agama Hindhu, Islam dan Kristen. Dengan lahirnya Republik Indonesia maka terwujudlah satu kesatuan cita dari berbagai masyarakat adat yang berbeda-beda sehingga menjadi Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda menjadi satu kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menentukan ciri-ciri orang Indonesia sama sulitnya dengan mengemukakan bagaimana ciri-ciri hukum perkawinan adat yang berlaku dalam berbagai lingkungan masyarakat adat. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai macam alat perlengkapan yang menyertai suatu upacara perkawinan. Dari pakaian mempelai yang serba macam menunjukkan latar belakang hukum perkawinan adat yang berbeda-beda di kalangan masyarakat bangsa Indonesia.

Namun demikian walaupun di sana-sini berbeda-beda, hampir di semua lingkungan masyarakat adat menempatkan masalah perkawinan sebagai urusan keluarga dan masyarakat, bukan semata-mata urusan pribadi yang melakukan perkawinan itu saja.

Dalam kehidupan manusia di dunia ini yang berlainan jenis kelaminnya secara alamiah mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan bathin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga/rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi.

Manusia tidak akan dapat berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Jadi perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat.

Perkawinan bagi masyarakat manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, bahkan dalam pandangan masyarakat adat perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Masalah perkawinan adalah merupakan hal yang umum dihadapi oleh masyarakat pada umumnya dan perlu adanya lembaga yang menangani secara serius mengingat negara kita yang terdiri dari banyak suku dan adat istiadat yang berbeda di masing-masing daerah. Suatu perkawinan sedikit tidaknya ditentukan oleh cara menarik garis keturunan baik dengan cara menarik garis keturunan sepihak/unilateral maupun dari

kedua belah pihak/bilateral.<sup>1</sup> Dikarenakan nilai-nilai yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan, yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan. Perkawinan akan menyangkut kedudukan sosial orang yang bersangkutan, dan pada orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial yang berbeda ada kalanya juga perkawinan itu merubah status seseorang yang bersangkutan. Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan (genealogis), maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Disamping itu ada kalanya suatu perkawinan merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menjauh atau retak, ia merupakan sarana pendekatan dan perdamaian kerabat.

Tata tertib adat perkawinan antar masyarakat adat yang satu berbeda dengan masyarakat adat yang lainnya, antara suku bangsa yang satu berbeda dengan suku bangsa yang lain, antara yang beragama Islam berbeda dengan yang beragama Kristen, Hindhu dan Budha begitu pula antara masyarakat kota dengan masyarakat desa.

---

<sup>1</sup> Soeryono Soekanto, Intisari Hukum Keluarga, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 15

Guna mengatur tata tertib perkawinan di kalangan masyarakat adat terdapat kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan, yang pada masing-masing lingkungan masyarakat adat terdapat perbedaan prinsip dan azas-azas perkawinan yang berlaku. Pada masyarakat adat yang susunan kekerabatannya kebapakan (patrilinial) berbeda dengan masyarakat adat yang susunan kekerabatannya keibuan (matrilinial). Bahkan di kalangan masyarakat adat yang selingkungan adat yang hukum adatnya bersamaan, terdapat variasi-variasi yang berlainan. Selanjutnya dikarenakan keadaan lingkungan, waktu dan tempat yang mempengaruhi maka perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi antara masyarakat adat yang satu dan yang lain tidak seimbang.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam masyarakat Bali atau suku bangsa Bali atau Bali Hindhu yang mendiami pulau Bali, masyarakatnya hidup dalam bentuk kesatuan hidup setempat yang disebut *pawongan* (desa) yang terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu desa adat dan desa dinas. Desa adat adalah desa tradisional yang terbentuk berdasarkan ketentuan adat turun temurun yang terikat secara religius ke dalam berbagai kegiatan upacara. Desa adat ini dipimpin oleh seorang *kelian adat* atau *bendesa adat*. Tokoh ini dipilih dari anggota kerapatan adat desa yang disebut *kerama desa* untuk waktu yang tidak terbatas. Sedangkan desa dinas adalah bentuk desa yang terpengaruh oleh sistem administrasi nasional karena merupakan bagian dari sebuah kecamatan dan berurut ke atas ke



Kabupaten dan Propinsi. Desa dinas dipimpin oleh seorang kepala desa yang disebut *perbekel*.<sup>2</sup> Sistem garis keturunan dan hubungan kekerabatan orang Hindhu di Bali berpegang pada prinsip patrilineal (*purusa*) yaitu perkawinan yang mempertahankan sanak saudara ber hukum kebapakan. Yang dimaksud dengan masyarakat patrilineal adalah :

1. Masyarakat hukum yang berdasarkan atas atau menarik garis keturunan hanya melalui garis bapak (laki-laki) saja
2. Semua yang termasuk keluarga dalam arti ikatan hukum kekeluargaan adalah garis bapak/keturunan bapak.
3. Dalam perkawinan istri masuk ke dalam keluarga suami dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah menjadi keluarga suami.
4. Istri putus hubungan hukum dengan keluarga asalnya.
5. Hak dan kewajiban baik dilihat dari hukum perkawinan, keluarga dan hak waris terletak di tangan garis keturunan keluarga bapak, termasuk dalam hubungannya dalam masyarakat.

Dalam situasi ini bila terjadi suatu perkawinan maka mempelai wanita masuk ke dalam golongan keluarga suaminya, dan keturunannya akan meneruskan sistem kekeluargaan dari suaminya.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa manusia yang sudah berada dalam tahap jenjang perkawinan tidak tertutup kemungkinan akan

---

<sup>2</sup> Sulyani Hidayah, Ensiklopedi Suku Bangsa Di Indonesia, PT.Pustaka LP3ES, IKAPI, 1997, hlm37

timbulnya hambatan-hambatan, dalam arti bahwa tidak semua perkawinan itu berjalan dengan normal sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Faktor penyebab putusnya perkawinan tersebut antara lain tidak adanya pengertian antara kedua belah pihak sehingga terjadi suatu perceraian.

Disamping itu putusnya suatu perkawinan dapat pula disebabkan oleh karena salah satu pihak meninggal dunia, sehingga mereka yang masih hidup tersebut menurut adat Bali dinamakan *Balu*<sup>3</sup> (janda), sehingga pada masyarakat Bali dikenal adanya suatu perkawinan yang terjadi bila seorang janda menetap dalam kerabat suaminya yang telah meninggal, kawin dengan saudara laki-laki suaminya. Adapun perkawinan semacam ini disebut dengan perkawinan mengganti/ *Nganten Mesalin Tikeh*<sup>4</sup> yang dalam bahasa asing dikenal dengan istilah *Leviraathuweljk*. Perkawinan mengganti (*leviraathuweljk*) ini merupakan kebalikan daripada perkawinan meneruskan (*sororat*) yaitu suatu perkawinan dari seorang duda dengan saudara perempuan mendiang istrinya, dimana istri kedua itu tanpa pembayaran jujur tambahan seakan-akan meneruskan fungsi dengan menduduki tempat istri pertama.<sup>5</sup>

Tujuan dilakukannya perkawinan mengganti ini adalah untuk mempertahankan garis keturunan kebapakan (patrilinial) dimana menurut

<sup>3</sup> T.I.P Astiti, Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Agama Hindu di Bali, diterbitkan oleh Biro Dokumentasi dan Publikasi Fak. Hukum dan Pengetahuan Masyarakat UNUD, 1981, hlm. 33(selanjutnya disingkat T I P Astiti I)

<sup>4</sup> Ter Haar Bzn, Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesporoto, Azas-azas dan Sususnan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hlm. 203

<sup>5</sup> Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, Cet I, Liberty, Yogyakarta, 1978, hlm.142

kebiasaan atau tradisi perkawinan mengganti pada umumnya dilakukan diantara mereka yang masih ada hubungan kekerabatan.

Adapun maksud diadakannya perkawinan mengganti (*leviraathuwelijk*) ini adalah agar masih tetap ada yang bertanggung jawab dan ikut memelihara dan mendidik anak-anak janda itu apalagi anak-anak yang masih di bawah umur. Dengan terlaksananya perkawinan tersebut maka secara langsung harta guna kaya yang diperoleh istri dari perkawinannya yang pertama akan dibawa ikut serta kedalam kehidupan perkawinannya yang kedua, dan dapat digunakan sebagai sumber penghidupan di dalam kehidupan perkawinan yang kedua.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan semua uraian dalam latar belakang tersebut di atas selanjutnya dalam tulisan ini akan dicoba memberikan ulasan terhadap permasalahan yang timbul, antara lain :

1. Mengapa tata cara pelaksanaan perkawinan mesalin tikeh pada masyarakat Bali dilaksanakan ?
2. Bagaimana pengaturan harta guna kaya dalam perkawinan mesalin tikeh pada masyarakat Bali ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan mengganti/ *mesalin tikeh* di Desa Selemadeng Kabupaten Tabanan, Bali.

Sedangkan secara spesifik, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara jelas tentang tata cara pelaksanaan perkawinan *mesalin tikeh* terhadap si janda yang masih berada pada keluarga almarhum suaminya yang terjadi di Bali khususnya di Desa Selemadeg, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaturan harta guna kaya di dalam perkawinan *mesalin tikeh* pada masyarakat Bali.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis. Manfaat yang bersifat teoritis dari penulisan tesis ini adalah diharapkan dapat memberikan saran, masukan terhadap perkembangan yang menyangkut hukum adat khususnya hukum perkawinan adat.

Sedangkan manfaat secara praktis dari penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi ilmiah guna melakukan pengkajian lebih lanjut dan

mendalam tentang lembaga-lembaga adat khususnya di bidang perkawinan adat.

2. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan masukan bagi pembinaan dan pengembangan hukum nasional yang berdasarkan pada hukum adat khususnya yang menyangkut hukum perkawinan dan hukum waris.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan tesis ini peneliti merasa perlu adanya penulisan sistematika sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari isi tesis yang ditulis sebagai berikut :

##### **Bab I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan tentang pokok bahasan yang menjadi landasan penelitian, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian serta kegunaan penelitian.

##### **Bab II. TINJAUAN PUSTAKA**

Uraian dalam bab ini pertama adalah sebagai tinjauan Pengertian Dan Sahnya Perkawinan, kedua menguraikan tentang Bentuk-Bentuk Perkawinan Menurut Hukum Adat, Pengertian Dan Tujuan Perkawinan Mengganti/ Perkawinan *Mesalin Tikeh*, Macam-Macam Harta Perkawinan, serta Akibat Hukum Perkawinan Mengganti/ Perkawinan *Mesalin Tikeh* Terhadap Harta Guna Kaya Dari Perkawinan Yang Pertama.

### **Bab III. METODE PENELITIAN**

Uraian dalam bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan *yuridis-empiris*, hasil penelitian ini nantinya akan bersifat *deskriptif analisis*, dalam penelitian ini sampel ditentukan melalui *purposive sampling*, sumber data yang didapat, serta analisa data.

### **Bab VI. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Analisa dalam bab ini membicarakan tentang hasil penelitian dan pembahasan permasalahan, pertama tentang tata cara pelaksanaan perkawinan *Mesalin Tikeh* / perkawinan Mengganti, kedua tentang pengaturan harta Guna Kaya pada perkawinan *Mesalin Tikeh* / perkawinan Mengganti.

### **Bab V. PENUTUP**

Dalam bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran berdasarkan diskripsi yang telah disajikan pada bab I dan bab II serta analisis yang telah diuraikan pada bab III dan bab VI.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian dan Sahnya Perkawinan**

##### **A.1. Pengertian perkawinan**

Peranan yang dimiliki oleh hidup bersama sangat penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat, sehingga negara membutuhkan tata tertib dan kaedah-kaedah yang mengatur hidup bersama ini. Peraturan-peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.

Tata tertib dan kaedah-kaedah inilah yang telah dirumuskan dalam suatu undang-undang yang disebut Undang-undang Pokok Perkawinan yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 dirumuskan pengertian perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari rumusan pengertian Pasal 1 tersebut dapat ditarik beberapa unsur yang ada dalam perkawinan :

1. Adanya ikatan lahir bathin  
Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan. Ikatan ini bukan saja ikatan bathiniah antara seorang pria dengan seorang wanita, bahkan ikatan bathin ini merupakan inti dari ikatan lahir.

2. Antara seorang pria dan wanita.  
Unsur pria dan wanita ini menunjukkan secara biologi yang akan melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis kelamin, oleh karena perkawinan adalah membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.
3. Sebagai suami istri.  
Seorang pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan secara yuridis statusnya berubah. Pria menjadi suami dan wanita menjadi istri.
4. Adanya tujuan.  
Tujuan perkawinan dalam kehidupan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan seorang wanita yang sudah memiliki ikatan bathin kemudian melangsungkan perkawinan harus menuju pada kebahagiaan dan kesejahteraan baik secara materiil maupun secara moril.
5. Adanya unsur yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.  
Unsur ini mengandung arti bahwa Undang-undang Perkawinan tidak dapat melepaskan diri dari aspek religius (Keagamaan atau aspek rohani)<sup>6</sup>

Di samping pengertian perkawinan yang terdapat di dalam Undang-undang perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 penulis juga mencantumkan beberapa definisi tentang pengertian perkawinan dari beberapa sarjana diantaranya :

Ter Haar Bzn, mengatakan bahwa perkawinan merupakan suatu usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya golongan dengan tertibnya suatu syarat yang menyebabkan terlahirnya angkatan baru yang meneruskan golongan itu.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Cet. VI Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 14

<sup>7</sup> Ter Haar Bzn, Op. Cit. hlm. 187



Sedangkan R. Soebekti mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang satu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>8</sup>

Sayuti Talib mengatakan bahwa perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>9</sup>

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan tuhan nya maupun hubungan manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat. Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>R. Soebekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet. XIX, PT. Internusa, Jakarta, 1974, hlm. 20

<sup>9</sup> Sayuti Talib, Hukum Keluarga Indonesia, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 58

<sup>10</sup> H. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990 hlm.9 (selanjutnya disingkat Hilman Hadikusuma I)

Perkawinan yang terjadi di dalam masyarakat Hindu di Bali menurut I Gusti Ketut Kaler adalah ikatan lahir bathin bahkan kemanunggalan pribadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>11</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat dilihat bahwa masing-masing sarjana memberikan definisi yang berbeda menurut pendapatnya masing-masing, tetapi kalau dipahami sebetulnya perbedaan pendapat tersebut bukanlah untuk menunjukkan pertentangan-pertentangan yang berarti antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain, melainkan perbedaan-perbedaan tersebut hanya terdapat dalam keinginan penulis untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan. Namun suatu hal yang perlu digarisbawahi bahwa di dalam perumusan pengertian perkawinan tersebut adanya unsur yang merupakan kesamaan dari setiap perumusan yaitu bahwa perkawinan itu adalah merupakan suatu perjanjian, dimana perjanjian itu sifatnya suci untuk membentuk keluarga atau rumah tangga antara seorang pria dengan seorang wanita yang berdasarkan atas Ketuhanan yang maha Esa.

---

<sup>11</sup> Gede Pudja, Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu (didasarkan Manusmerti), Mayasari, Jakarta, 1983/1984, hlm. 16

Di sini penulis juga mengemukakan sebuah pandangan mengenai perkawinan menurut agama Hindu dalam masyarakat adat Bali, antara lain berdasarkan kitab Manusmerti yang menyatakan bahwa :

Perkawinan bersifat religius dan obligator, karena dikaitkan dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan dan menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan keturunan seorang putra. Perkawinan (*Wiwaha*) sebagai *samskara* adalah suatu ritualia yang memberikan kedudukan sah tidaknya suatu perkawinan menurut hukum Hindu. Menurut ajaran Manusmerti, suatu perkawinan yang tidak disakralkan dianggap tidak mempunyai akibat hukum kepada perkawinan itu. Adapun mengenai ritualia itu sendiri pelaksanaannyapun harus sesuai karena bila hal itu tidak memenuhi ketentuan dapat pula menimbulkan akibat batalnya perkawinan itu sendiri atau tidak sahnya perkawinan itu.<sup>12</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut agama Hindu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita.
- Harus dianugrahi oleh Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa.

## A.2. Sahnya Perkawinan

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak menurut aturan Undang-undang Perkawinan UU No. 1 tahun 1974 berarti tidak sah menurut perundang-undangan, kalau tidak menurut aturan hukum agama berarti

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 20

tidak sah menurut agama, begitu pula kalau tidak menurut tata tertib hukum adat adalah tidak sah menurut hukum adat.

Sahnya perkawinan menurut perundang-undangan terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari bunyi pasal tersebut bahwa perundang-undangan memberikan petunjuk untuk memberlakukan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dalam melaksanakan perkawinan. Hal ini merupakan penghormatan dari Undang-undang nomor 1 tahun 1974 terhadap hukum yang berlaku di masyarakat sepanjang aturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu/Budha.

Dari bunyi dan penjelasan Pasal 2 ayat 1 ini dapat dinyatakan sah tidaknya perkawinan semata-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan bagi mereka yang melakukan perkawinan. Di dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang dimaksud kepercayaannya itu adalah agama dan kepercayaan yang dipeluk seseorang. Jika perkawinan telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat.

Karena suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu, maka sahnya perkawinan itu ditinjau dari masing-masing agama sebagai sumbernya. Menurut hukum adat Bali yang menjadi sumbernya adalah apa yang diatur dalam kitab undang-undang agama Hindu yang dikenal dengan *Manawa Dharmasastra*.

#### **B. Bentuk-bentuk Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Dikarenakan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat di Indonesia berbeda-beda, maka terdapat bentuk-bentuk perkawinan yang berbeda-beda pula. Karena disini penulis mengangkat permasalahan mengenai perkawinan mengganti maka dalam penulisan ini penulis membatasi pada masyarakat adat yang susunannya petrilinial dimana menganut bentuk perkawinan jujur.

Menurut Bushar Muhammad, masyarakat dengan garis keturunan bapak atau masyarakat kebapakan adalah suatu sistem kekeluargaan dengan para anggota masyarakat hukum yang menarik garis keturunan secara konsekwen melalui garis laki-laki atau bapak.<sup>13</sup>

Masyarakat kebapakan adalah suatu masyarakat yang terbagi dalam clan-clan kebapakan, yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan secara konsekwen dan berdasar pandangan yang bersifat religio magis, melalui garis ayah atau laki-laki. Sebagai konsekwensinya

---

<sup>13</sup> Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat, Cet. III, CV. Muliasari, Jakarta, 1985, hlm. 21

diadakanlah suatu sistem perkawinan yang cocok untuk mempertahankan garis bapak itu, yaitu kawin jujur.

Bentuk perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak wanita, maka berarti setelah perkawinan si wanita akan mengalihkan kedudukannya ke anggota kerabat suami untuk selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu.<sup>14</sup>

Dengan diterimanya uang atau barang jujur, berarti si wanita mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut di pihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa akan tunduk pada hukum adat suaminya, kecuali ada ketentuan lain yang menyangkut barang-barang bawaan istri tertentu. Setelah istri berada di tangan suami, maka istri dalam segala perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan suami atau atas nama suami atau atas persetujuan kerabat suami.

Bentuk-bentuk perkawinan jujur ini dapat dibedakan dalam beberapa macam, antara lain :

1. Perkawinan Mengabdi

Perkawinan mengabdi terjadi dikarenakan ketika diadakan pembicaraan lamaran, ternyata pihak pria tidak dapat memenuhi syarat-syarat permintaan dari pihak wanita, sehingga setelah

---

<sup>14</sup> H. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.72 (selanjutnya disingkat Hilman Hadikusuma II)

perkawinan maka suami akan terus menerus bertempat kediaman atau berkedudukan di pihak kerabat istri.<sup>15</sup>

2. Perkawinan Bertukar atau perkawinan ambil beri

Perkawinan bertukar adalah perkawinan yang terjadi diantara kerabat yang sifatnya simetris, dimana pada suatu masa kerabat A mengambil istri dari kerabat B, di masa yang lain kerabat B mengambil istri dari kerabat A.<sup>16</sup>

3. Perkawinan Meneruskan

Perkawinan meneruskan merupakan perkawinan seorang laki-laki dengan saudara perempuan istrinya dikarenakan istrinya meninggal dunia, dimana istri kedua ini tanpa mendapat pembayaran jujur seakan-akan menempati kedudukan istri yang telah wafat<sup>17</sup>

4. Perkawinan Ambil Anak

Yang dimaksud perkawinan ambil anak adalah perkawinan yang terjadi dikarenakan hanya mempunyai seorang anak wanita, maka anak wanita itu mengambil pria menjadi suaminya dan mengikuti kerabat istri untuk selama perkawinannya guna menjadi penerus keturunan dari pihak istri.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 77

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Kekerabatan Adat, Fajar Agung, Jakarta, 1987, hlm. 78

<sup>17</sup> Ter Haar Bzn, Loc. Cit.

<sup>18</sup> Hilman Hadikusuma, Op. Cit, hlm. 80

## 5. Perkawinan Mengganti

Perkawinan mengganti terjadi bila seorang janda yang menetap di lingkungan kerabat mendiang suaminya, kawin dengan saudara laki-laki suami tersebut. Jenis perkawinan ini termasuk khas di dalam sistim patrilineal selaku sarana pelengkap perkawinan jujur.

Dalam hukum adat Bali dikenal dua bentuk perkawinan, yaitu :

1. Bentuk biasa, yaitu si laki-laki berkedudukan selaku purusa, dimana si wanita beralih ke pihak keluarga si laki-laki. Si wanita keluar dari keluarga asalnya dan masuk menjadi keluarga suaminya dengan segala akibatnya.
2. Bentuk nyeburin, yaitu si wanita berkedudukan sebagai purusa. Dalam hal perkawinan ini si suami keluar dari keluarga asalnya dan diterima sebagai anggota baru keluarga istrinya.<sup>19</sup>

Dalam perkawinan biasanya dimana si wanita beralih ke pihak keluarga laki-laki yang dapat dibedakan atas beberapa macam perkawinan, yaitu :

1. Perkawinan dengan lebih dari satu istri yang disebut dengan *Mengemaduang*. Perkawinan dengan lebih dari satu istri ini disebut juga *Kresna Brahmacari*
2. Perkawinan dengan satu istri yang disebut dengan *Swala Brahmacari*.
3. Perkawinan *Makedengan Ngaad* yang disebut juga *Arabian Ngalap Saling Alap*.
4. Perkawinan *Ngajangin*, yang dimaksud adalah bila dua orang bersaudara laki-laki sama-sama mengambil istri dari dua wanita yang bersaudara.
5. Perkawinan *Prabu Ngemban Putra* adalah perkawinan antara paman dengan kemenakan.
6. Perkawinan *Mesalin Tikeh*, yaitu perkawinan antara janda dengan saudara laki-laki suaminya, yang disebut dengan perkawinan mengganti.

---

<sup>19</sup> T.I.P. Astiti I, Op. Cit, hlm. 9



7. Perkawinan meneruskan, yaitu perkawinan antara seorang duda dengan saudara perempuan istrinya.<sup>20</sup>

Disamping bentuk perkawinan di atas, dikenal juga adanya 3 macam cara melakukan perkawinan pada masyarakat adat Bali, yaitu :

1. Memadik/Ngidih.

Yaitu suatu perkawinan yang didahului oleh adanya suatu peminangan yang dilakukan oleh keluarga dari pihak mempelai laki-laki pada keluarga pihak mempelai perempuan. Cara perkawinan ini biasanya diawali dengan adanya kesepakatan untuk kawin antara si laki-laki dengan si wanita.

2. Kejangkepang/Kepekardiang.

Yaitu perkawinan yang inisiatifnya datang dari kedua orang tua calon mempelai untuk mengawinkan anaknya. Perkawinan ini biasanya timbul diantara orang-orang yang ada hubungan keluarga dengan maksud untuk mempererat hubungan keluarga mereka.

3. Ngerorod.

Yaitu perkawinan yang dilangsungkan atas inisiatif kedua calon mempelai dengan cara kawin lari. Dalam perkawinan ngerorod ini biasanya tanpa adanya paksaan dari pihak lain dan kedua mempelai melakukan perkawinan atas dasar saling mencintai.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 10

<sup>21</sup> A.A.N. Kaleran dan I Gusti Agung Oka, Hukum Perkawinan Secara Adat dan Agama Hindu di Bali, Denpasar 1963, hlm 24

## C. Pengertian dan Tujuan Perkawinan Mengganti

### C.1. Pengertian perkawinan Mengganti

Terjadinya perkawinan mengganti/ganti suami yang dalam bahasa asing disebut “leviraat huwelijk” adalah dikarenakan suami wafat, maka istri harus kawin dengan saudara pria dari suami yang telah wafat. Dalam bentuk perkawinan ini tidak diperlukan lagi pembayaran jujur, pembayaran adat dan lain-lainnya oleh karena istri memang masih tetap berada di rumah suami, hanya perlu adanya pengetahuan dari pihak kerabat istri.<sup>22</sup>

Menurut Ter Haar Bzn, perkawinan mengganti terjadi apabila seorang janda yang menetap dalam kerabat suaminya yang telah meninggal kawin dengan saudara laki-laki.<sup>23</sup> Demikian pula menurut Tjokorda Istri Putra Astiti berpendapat bahwa perkawinan mengganti terjadi apabila si istri dikawini oleh saudara laki-laki suaminya yang telah meninggal. Perkawinan semacam ini di Bali dikenal dengan istilah *Nganten Mesalin Tikeh*.<sup>24</sup>

Dari pendapat para sarjana di atas dapat dikatakan bahwa perkawinan mengganti merupakan perkawinan yang terjadi antara seorang janda dengan saudara almarhum suaminya dimana

---

<sup>22</sup> Hilman Hadikusuma, Op. Cit, hlm. 74

<sup>23</sup> Ter Haar Bzn, Loc. Cit

<sup>24</sup> T.I.P. Astiti II, Op. Cit, hlm 23

perkawinan mengganti ini biasanya terjadi didalam satu lingkungan kerabat/keluarga.

### **C.2. Tujuan Perkawinan Mengganti**

Jika di dalam perkawinan dengan suami pertama yang telah wafat sudah didapat anak laki-laki berarti sudah ada penerus dari ayahnya, maka fungsi suami kedua hanya sebagai pemelihara kehidupan rumah tangga saja dan membesarkan anak laki-laki tersebut. Tetapi jika belum ada anak laki-laki maka dari perkawinan yang kedua di harapkan adanya anak laki-laki untuk menjadi penerus dari suami yang pertama, sehingga suami yang kedua tidak semata-mata sebagai pemelihara kehidupan rumah tangga tetapi juga berfungsi untuk meneruskan keturunan suami yang pertama.

Apabila terdapat kejadian baik dari perkawinan pertama maupun perkawinan yang kedua tidak memperoleh anak laki-laki tetapi hanya didapat anak wanita, maka di dalam hal ini anak wanita yang tertua dalam perkawinan pertama atau dari perkawinan yang kedua jika dalam perkawinan pertama belum mempunyai anak harus dijadikan laki-laki dalam arti harus kawin mengambil laki-laki dari anggota kerabat untuk menjadi penerus dari suami yang pertama.

Menurut Ter Haar Bzn, tujuan perkawinan mengganti adalah agar ada seorang laki-laki dewasa yang dapat ikut membantu dan memelihara anak-anak serta harta perkawinan dari janda tersebut.<sup>25</sup> Demikian pula Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa tujuan dari perkawinan mengganti adalah agar ada seorang laki-laki dewasa yang dijadikan sebagai suami kedua, dimana suami yang kedua ini diharapkan dapat ikut membantu kehidupan rumah tangga janda tersebut antara lain ikut membantu mengurus dan memelihara anak-anak dan harta perkawinan dari perkawinan yang pertama.<sup>26</sup>

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa tujuan dari perkawinan mengganti tersebut adalah agar suami kedua dari janda tersebut dapat menggantikan kedudukan dari almarhum suami pertama istrinya dengan melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang suami yaitu memelihara dan mengurus anak-anak apabila dari perkawinan yang pertama telah memperoleh anak serta mengurus harta perkawinan yang ada.

#### **D. Macam-macam Harta Perkawinan**

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 35 ayat 1 dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi

---

<sup>25</sup> Ter Haar Bzn, Op. Cit, hlm. 203

<sup>26</sup> Hilman Hadikusuma II, Op.Cit, hlm 74

harta bersama. Sedangkan ayat 2 menyatakan bahwa harta bawaan masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah perkawinan ataupun warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Menurut hukum adat yang dikutip dari bukunya Hilman Hadikusuma yang dimaksud dengan harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah. Kesemua itu dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut masyarakat setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Harta perkawinan itu terdiri dari berbagai macam bentuk, seperti yang dikemukakan oleh beberapa sarjana sebagai berikut :

Menurut Ter Haar Bzn, menyebutkan harta perkawinan merupakan kekayaan keluarga yang dapat dibedakan dalam empat bentuk harta perkawinan, yaitu :

a. Harta Warisan

adalah harta yang dihibahkan atau harta yang diberikan kepada masing-masing pihak dimana harta tersebut tetap menjadi miliknya

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 156

atau milik sah seorang dari suami istri yang kerabatnya menghibahkan atau mewariskan harta. Di Bali harta warisan ini disebut *Bebaktan*.

- b. Harta yang diperoleh sendiri  
adalah harta yang diperoleh atas usaha sendiri dari masing-masing pihak/suami-istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan.
- c. Harta perkawinan bersama antara suami-istri  
adalah barang-barang yang diperoleh di masa perkawinan yang merupakan harta bersama antara suami-istri, sehingga merupakan harta benda dimana kalau timbul keperluannya (terutama bila perkawinan putus) suami dan istri masing-masing buat sebagian ada hak atasnya. Harta perkawinan bersama antara suami istri ini dalam bahasa daerah Bali disebut *Druwe gabro*.
- d. Harta benda yang dihadiahkan kepada suami istri bersama  
adalah harta yang diperoleh pada saat dilaksanakannya upacara perkawinan yang dihadiahkan kepada suami istri bersama.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut Soerojo Wignjodipoero menyebutkan harta perkawinan dalam empat golongan sebagai berikut :

- a. Barang-barang yang diperoleh secara pewarisan atau penghibahan,  
adalah barang-barang yang dimiliki oleh suami istri yang menerimanya dari warisan atau hibah, tetapi terpisah satu dari yang

---

<sup>28</sup> Ter Haar Bzn, Op. Cit, hlm. 221-229

lain, sampai pada saat barang-barang itu secara warisan beralih kepada anak-anak mereka. Anak-anak dan seterusnya keturunannya inilah yang melanjutkan hak atas kekayaan dari suatu keluarga.

- b. Barang-barang yang diperoleh dari jasa sendiri, adalah barang-barang yang diperoleh masing-masing suami istri atas jasa-jasanya sendiri. Apabila suami yang memperoleh barang itu maka ia sendiri yang menjadi pemiliknya dan istrinya menurut hukum adat tidak turut memiliki barang itu, tetapi dirasa wajar apabila istri sebagai anggota rumah turut mengenyam manfaat dari barang-barang tersebut. Demikian juga sebaliknya apabila istri yang memperoleh barang serta yang menjadi pemiliknya.
- c. Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami istri sebagai milik bersama.  
  
Bahwa barang-barang milik bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan ini merupakan bagian dari harta perkawinan. Istilah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan di Minangkabau dinamakan *harta suarang*, di Kalimantan dinamakan *barang perpantangan* dan sebagainya.
- d. Barang-barang hadiah pada waktu perkawinan, adalah barang-barang yang diterima sebagai hadiah perkawinan pada waktu pernikahan yang diperuntukkan kepada mempelai berdua, oleh

karenanya barang-barang tersebut menjadi harta milik bersama suami istri.<sup>29</sup>

Demikian juga Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa harta perkawinan kedudukannya sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami-istri, maka harta perkawinan itu dapat digolongkan dalam beberapa macam, yaitu :

- a. harta yang diperoleh/dikuasai suami atau istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan.
- b. harta yang diperoleh atau dikuasai oleh suami atau istri secara perseorangan sebelum atau setelah perkawinan yaitu harta penghasilan.
- c. harta yang diperoleh atau dikuasai suami dan istri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian.
- d. harta yang diperoleh suami istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah, yang disebut sebagai hadiah perkawinan.<sup>30</sup>

Harta perkawinan merupakan modal kekayaan yang dapat dipergunakan oleh suami istri untuk menjalani kehidupannya bersama anak-anaknya. Di dalam suatu keluarga/rumah tangga sepasang suami istri akan memiliki beberapa macam harta, diantaranya ada milik suami, ada kepunyaan istri serta ada sebagian merupakan guna kaya/milik bersama

---

<sup>29</sup> Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1983, hlm. 151-157

<sup>30</sup> Hilman Hadikusuma, Op. Cit, hlm. 157



antara keduanya, sehingga sesuai dari pendapat para sarjana di atas dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, serta berdasarkan hukum adat Bali dapat dinyatakan bahwa harta perkawinan terdiri dari :

- a. harta warisan, adalah harta yang diperoleh salah satu pihak baik suami maupun istri dari orang tuanya (pewaris) pada saat sebelum maupun sesudah dilaksanakannya perkawinan.
- b. harta penghasilan, adalah harta yang diperoleh atas jasa-jasa dari masing-masing suami istri baik sebelum perkawinan maupun sesudah perkawinan.
- c. harta *druwe gabro*, adalah harta yang diperoleh bersama-sama oleh suami istri pada waktu berlangsungnya perkawinan, walaupun salah satu tidak bekerja atau mempunyai pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian.
- d. *Bebaktan/ tatadan*, adalah harta yang diperoleh suami maupun istri yang diberikan pada saat dilangsungkan upacara perkawinan.

**E. Akibat Hukum Perkawinan Mengganti Terhadap Harta Guna Kaya Dari Perkawinan Yang Pertama**

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan

lain. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Menurut hukum adat, yang dimaksud dengan harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah. Kesemuanya itu dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut masyarakat setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri bersangkutan.

Menurut hukum adat Bali harta dalam perkawinan terdiri dari :

- a. harta Druwe gabro, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan.
- b. harta bebaktan/tetatadan, yaitu harta yang diberikan kepada anak perempuan pada saat dilangsungkan perkawinan.
- c. harta bawaan/pusaka, yaitu harta yang dibawa oleh suami dan istri ke dalam perkawinan sebagai jiwa dana.<sup>31</sup>

Mengenai status harta bawaan seperti tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

---

<sup>31</sup> Wayan Benny, Hukum Adat Dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia, (UU No. 1 Tahun 1974), Denpasar, Cet.II, Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum, Fak. Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Univ. Udayana, 1990, hlm. 27

- a. Terhadap harta guna kaya, yaitu harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri yang diperoleh atas usahanya sendiri sebelum perkawinan berlangsung, pada dasarnya masing-masing pihak dapat mengurus harta tersebut, akan tetapi setelah perkawinan berlangsung tiga tahun harta tersebut menjadi harta bersama/Druwe Gabro.
- b. Terhadap harta tetatadan, yaitu harta yang merupakan pemberian dari orang tua kepada anaknya pada waktu perkawinan dilangsungkan yang kemudian dibawa oleh suami istri ke dalam perkawinan menjadi miliknya masing-masing yang dikuasai secara penuh. Apabila dikehendaki setelah 5 tahun dapat dipersatukan dengan guna kaya sehingga menjadi milik bersama suami istri.
- c. Terhadap harta jiwa dana, kedudukan tetap menjadi miliknya sendiri. Apabila perkawinan putus karena suatu perceraian, maka harta jiwa dana dapat dibawa oleh istri. Apabila istri meninggal, harta jiwa dana ini dapat dipakai untuk biaya penghidupan anak, sehingga anak dapat mewarisi harta tersebut. Harta jiwa dana biasanya diberikan kepada anak perempuan yang kawin keluar.<sup>32</sup>

Berkaitan dengan penulisan tesis ini yaitu mengenai harta guna kaya pengurusannya dilakukan oleh pihak suami sesuai dengan sistem

---

<sup>32</sup> I Gusti Ketut Kaler, Op. Cit, hlm. 60

kekeluargaan patrilineal yaitu yang terdapat pada masyarakat hukum adat Bali. Akan tetapi apabila suami meninggal dunia, maka pengurusan terhadap harta guna kaya ini diurus oleh istri sebagai janda apabila si janda tetap melaksanakan dharmanya sebagai janda.

Van Bloeman Wanders dan Van Eck di dalam bukunya V.E. Korn mengemukakan bahwa janda-janda hanya mempunyai hak mengurus atau menikmati atau memakai atas harta benda yang ditinggalkan si suami, demikian pula suami kedua yang dinikahi janda tersebut tidak berhak untuk mewarisi harta guna kaya/harta peninggalan dari almarhum suami janda yang dikawini, melainkan ia berhak untuk memakai dan menikmati harta tersebut.<sup>33</sup> Jadi janda bukanlah ahli waris, selain mempunyai hak untuk menikmati atau hak memakai atas harta warisan almarhum suaminya, ia juga mempunyai hak mengurus harta tersebut selama anak-anaknya masih belum dewasa dan selama si janda masih mentaati dharmanya. Demikian pula kedudukan suami kedua dari perkawinan pengganti tersebut terhadap harta guna kaya dari istrinya, ia hanya berhak menikmati dan memanfaatkan namun tidak berhak untuk mewarisi harta guna kaya tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan pendapat Gede Pudja mengenai sistem kewarisan, bahwa didalam suatu keluarga yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang paling berhak sebagai ahli waris di

---

<sup>33</sup> V.E. Korn, Terjemahan I Gede Wayan Pangkat, Hukum Adat Waris di Bali, Fak. Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Univ. Udayana, Denpasar, 1972, hlm. 10

dalam suatu keluarga adalah anak laki-laki yang terlahir dari suatu perkawinan yang sah dari si pewaris.<sup>34</sup> Dapat dikatakan bahwa kedudukan dari suami kedua yang dikawini oleh janda tersebut adalah sama terhadap harta perkawinan khususnya harta guna kaya dimana mereka hanya berhak untuk menikmati dan memanfaatkan harta tersebut. Sedangkan yang paling berhak untuk mewarisi harta tersebut adalah anak laki-laki yang terlahir dari perkawinan yang pertama dari si janda tersebut.

---

<sup>34</sup> Gede Pudja, Hukum Kewarisan Hindu Yang Direvisi Kedalam Hukum Adat di Bali dan Lombok, Cet.I, 1977, hlm. 51

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

Untuk mendapatkan hasil yang mempunyai nilai validitas yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang tepat juga diperlukan untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari serta memahami obyek yang diteliti. Dengan demikian penelitian akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Metodologi yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Dengan demikian metodologi penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro tentang penelitian hukum, bahwa :

“Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer”<sup>35</sup>

Dengan menggunakan metodologi seseorang diharapkan mampu menemukan, menentukan, menganalisis suatu masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran. Karena metodologi mampu memberikan pedoman tentang cara bagaimana seseorang ilmuwan mempelajari, menganalisis

---

<sup>35</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Graha Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.9

serta memahami permasalahan yang dihadapi. Didalam mengadakan penelitian penulis menggunakan penelitian sebagai berikut :

#### **A. Metode Pendekatan**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*. Metode *Yuridis Empiris* yaitu suatu metode yang mengkaji permasalahan pada ketentuan-ketentuan atau norma hukum yang berlaku dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat adat serta kaidah-kaidah yang bersifat perilaku berulang-ulang dalam hukum adat. Pendekatan empiris mempergunakan sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan atau responden yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pelaksanaan perkawinan pengganti pada masyarakat Bali serta pengaturan harta guna kaya pada masyarakat Bali. Dengan pendekatan ini penulis meninjau dari segi gejala masyarakatnya yang dapat dipelajari hal-hal yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai kehidupan sosial. Sedangkan pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan, dan melihat perkembangan hukum adat yang mengarah ke hukum yang lebih modern dan yang terus mengikuti perkembangan jaman serta hukum adat dengan eksistensinya di dalam hukum perkawinan nasional.

Jadi pendekatan *Yuridis Empiris* digunakan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi proses bekerjanya hukum dalam pelaksanaan

perkawinan mengganti (mesalin tikeh) dan pengaturan harta guna kayanya pada masyarakat Bali.

## **B. Spesifikasi Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat *deskriptif analitis* yaitu memaparkan, menggambarkan, atau mengungkapkan system hukum adat setempat ataupun peraturan perundang-undangan lainnya, eksistensi kehidupan masyarakat serta relevansinya, khususnya dalam pengaturan perkawinan adat. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri dan terakhir menyimpulkannya.

## **C. Populasi dan Penentuan Sampel**

### **a. Populasi**

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kabupaten Tabanan Kecamatan Selemadeg khususnya di Desa Selemadeg.

### **b. Sampel**

Dalam penelitian ini pengambilan sample menggunakan teknik Non Random Sampling. Jenis yang digunakan adalah metode purposive sampling yaitu teknik yang biasa dipilih karena



alasan biaya, waktu dan tenaga, sehingga tidak dapat mengambil sample dalam jumlah besar. Seperti yang dikemukakan oleh Mardalis, yaitu :

“Penggunaan teknik purposive sample mempunyai suatu tujuan atau dilakukan dengan sengaja, cara penggunaan sample ini diantara populasi sehingga sample tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya. Penggunaan teknik ini senantiasa berdasarkan kepada pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang telah diperoleh dari populasi sebelumnya.”<sup>36</sup>

Dengan metode ini sample ditentukan berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat kepada persyaratan-persyaratan antara lain : didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.

Konkritnya, akan ditentukan dahulu siapa yang akan menjadi informan kunci (*key informan*), yaitu orang yang mengetahui secara mendalam mengenai perkawinan adat yang ada di lapangan. Bertolak dari informan kunci ini maka akan dilakukan penggalan data pada informan-informan lainnya hingga terjawab permasalahan penelitian. Teknik ini adalah suatu cara dengan merujuk keterangan dari satu informan kunci dipergunakan untuk melacak informan lain guna melengkapi data yang diperlukan.

---

<sup>36</sup> Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, 1989, hlm.58

Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi atau keterangan dalam melakukan penelitian di lapangan.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini antara lain :

*Pertama* pihak-pihak yang mengetahui secara mendalam tentang perkawinan adat. Dalam penelitian ini, peneliti menilai bahwa sosok bendesa adat merupakan informan kunci. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa bendesa adat merupakan orang yang secara formal mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur permasalahan adat di wilayah kekuasaannya serta menyelesaikan berbagai permasalahan adat yang ada di desa tersebut.

Keterangan yang diperoleh dari Bendesa adat dipergunakan sebagai bahan untuk melacak informan lain yaitu anggota masyarakat yang melaksanakan perkawinan mengganti (*mesalin tikeh*) untuk mendapatkan data yang lengkap dan sebagai bahan untuk mencocokkan kembali data yang diperoleh dari informan lain.

*Kedua*, peneliti memilih tokoh masyarakat seperti para pemangku sebagai informan. Menurut hemat penulis, tokoh masyarakat ini merupakan orang yang berpengaruh dan mempunyai pandangan yang lebih luas dalam menghadapi berbagai masalah sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini sebelum terjun ke masyarakat, peneliti terlebih dahulu menghubungi dan

melakukan pendekatan kepada para tokoh masyarakat dengan cara bertandang atau bersilaturahmi. Pendekatan secara pribadi kepada tokoh masyarakat lebih memberikan manfaat positif dalam penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini meliputi data primer dan data sekunder :

1. Data Primer, adalah data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan. Data ini diperoleh melalui wawancara secara mendalam dan pengamatan (observasi) di lapangan. Wawancara dilakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui adat setempat khususnya tentang perkawinan adat dan warga masyarakat desa setempat yang melaksanakan perkawinan mengganti (*mesalin tikeh*) tersebut.
2. Data sekunder, adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer.

Adapun data sekunder tersebut terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu Undang-undang Pokok Perkawinan UU No.1 Tahun 1974.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer, yaitu :
- Buku-buku ilmiah.
  - Makalah-makalah.
  - Hasil-hasil penelitian dan wawancara kepada masyarakat yang terlibat didalam perkawinan mengganti.

Di dalam bukunya tentang Metode Penelitian Hukum, Ronny Hanitijo Soemitro membagi jenis dan sumber data menjadi dua (2) yaitu : Data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa Norma Dasar Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang, Yurisprudensi, Traktat dan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai peraturan organik. Bahan hukum sekunder, berupa Rancangan Peraturan Perundang-undangan, buku hasil karya para sarjana dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tertier berupa bibliografi dan indeks komulatif.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Cit, Hlm. 52

## **E. Analisis Data**

Dalam menganalisis data dipergunakan analisis kualitatif. Dari data yang telah dikumpulkan dan telah dicek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yakni :

- a. Reduksi data, adalah data yang diperoleh dilapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci, laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya.
- b. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi, lalu berusaha untuk dicari maknanya. Kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya kemudian disimpulkan.<sup>38</sup>

## **F. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Selemadeg, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Bali.

## **G. Jadwal Waktu Penelitian Dan Penulisan**

- a. Tahap penelitian lapangan

Waktu yang digunakan untuk penelitian lapangan adalah selama satu (1) bulan.

- b. Tahap Penulisan

---

<sup>38</sup> Nasution S., Metode Penelitian Kualitatif, Tarsito, Bandung, 1992, Hlm. 129

Waktu penulisan tiga (3) bulan, sehingga waktu untuk mempersiapkan tesis ini hingga selesai adalah selama empat (4) bulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Setelah penulis melakukan penelitian kurang lebih selama satu (1) bulan, selanjutnya penulis akan menguraikan hasil penelitian tersebut disertai dengan pembahasan.

Untuk lebih memperjelas uraian ini, BAB IV ini akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- A. Gambaran umum lokasi penelitian.
- B. Pelaksanaan perkawinan mesalin tikeh (*leviraathuwelijk*) pada masyarakat Bali.
- C. Pengaturan harta guna kaya pada perkawinan mesalin tikeh (*leviraathuwelijk*) pada masyarakat Bali.

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Seperti yang telah penulis uraikan pada Bab Pendahuluan bahwa penelitian mengambil lokasi di Desa Selemadeg, Kecamatan Selemadeg, Daerah Tingkat II Tabanan, Propinsi Bali, tentang pengaturan harta dan perkawinan adat.

Pada uraian di bawah ini, penulis akan memberikan gambaran umum tentang segala sesuatu mengenai keadaan lokasi penelitian.

## **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di :

Desa : Selemadeg

Kecamatan : Selemadeg

Kabupaten : Tabanan

Propinsi : Bali

Selanjutnya penulis akan menguraikan tentang situasi dan kondisi Desa Selemadeg, sebagai berikut :

### **I. Umum**

#### **1. Luas dan Batas Wilayah**

a. Luas desa/kelurahan : 2.184 Ha.

b. Batas Wilayah :

Batas Utara : Desa Pupuan Sawah

Batas Selatan : Desa Serampingan

Batas Timur : Desa Megati

Batas Barat : Desa Berembeng

### **II. Kependudukan**

#### **1. Jumlah penduduk menurut :**

a. Jenis Kelamin

Laki-laki : 1.141 orang

Perempuan : 1.218 orang

Jumlah : 2.359 orang

b. Kepala keluarga : 718 KK



2. Jumlah penduduk menurut agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

- a. Islam : - orang
- b. Kristen : - orang
- c. Katolik : - orang
- d. Hindhu : 2.359 orang
- e. Budha : - orang
- f. Kepercayaan : - orang

3. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

a. Lulusan pendidikan umum

- 1. Taman kanak-kanak : 16 orang
- 2. Sekolah Dasar : 797 orang
- 3. SMP/SLTP : 411 orang
- 4. SMA/SLTA : 333 orang
- 5. Akademi/D1-D3 : 15 orang
- 6. Sarjana S1-S3 : 7 orang

b. Lulusan pendidikan khusus

- 1. Pondok pesantren : - orang
- 2. Madrasah : - orang
- 3. Pendidikan keagamaan: - orang
- 4. Sekolah luar biasa : - orang
- 5. Kursus/ Ketrampilan : - orang

4. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

a. Karyawan :

1. Pegawai Negeri Sipil : 25 orang

2. ABRI : 6 orang

3. Swasta : 50 orang

b. Wiraswasta/pedagang : 23 orang

c. Tani : 2171 orang

d. Pertukangan : 35 orang

e. Buruh tani : 40 orang

f. Pensiunan : 2 orang

g. Nelayan : -

h. pemulung : -

i. jasa : 15 orang

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

Desa Selemadeg terletak di tengah Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Bali. Adapun desa yang menjadi tetangga dari Desa Selemadeg mempunyai situasi dan kondisi yang hampir sama.

Khusus Desa Selemadeg, sehubungan dengan penulisan tesis ini yang perlu kita ketahui adalah tentang : pendidikan, agama dan pekerjaan warga masyarakatnya. Ketiga hal tersebut ada korelasinya dengan pembahasan permasalahan tesis ini.

1. Tentang agama yang dianut oleh warga masyarakat.

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa agama mayoritas penduduk Desa Selemadeg adalah Agama Hindhu, yaitu 100%. Mengingat pengaruh ajaran agama sangat besar terhadap adat dan hukum adat masyarakat adat yang bersangkutan, masyarakat Desa Selemadeg adalah masyarakat yang taat dan tunduk terhadap ajaran Agama Hindhu termasuk dalam hal ini juga terhadap hukum adatnya.

Desa adat Selemadeg adalah merupakan desa adat, karena telah memenuhi syarat-syarat sebagai desa adat, yaitu memiliki Pura Puseh, Pura Desa dan Pura Dalem dimana di Bali dikenal dengan sebutan *Tri Kayangan*.

2. Tentang pendidikan masyarakat Desa Selemadeg

Dari data di atas dapat penulis simpulkan bahwa pendidikan masyarakat Desa Selemadeg adalah menengah kebawah. Hal ini dapat kita lihat dari data bahwa yang tamat Taman kanak-kanak 16 orang, SD 797 orang, SMP 411 orang, dibandingkan dengan tamatan SMA 353 orang dan sarjana hanya 7 orang.

3. Tentang Pekerjaan/Mata Pencaharian Masyarakat Desa Selemadeg

Dari data di atas dapat penulis simpulkan bahwa warga masyarakat Desa Selemadeg mata pencahariannya sebagian besar sebagai petani. Hal ini dapat kita maklumi karena kondisi tanah

untuk pertanian sangat subur sehingga sangat efektif untuk lahan pertanian.

### Posisi Kasus

Pada tahun 1959 di Banjar Selemadeg Kaja, Desa Selemadeg, Kecamatan selemadeg, Kabupaten Tabanan, telah dilaksanakan suatu rangkaian upacara perkawinan antara Ida Bagus Pandu dengan Ida Ayu Ketut Suwen. Perkawinan mereka merupakan perkawinan biasa seperti umumnya yang dilakukan oleh masyarakat Bali khususnya daerah Tabanan, dimana diawali dengan proses peminangan (*ngeraos*) dan setelah mendapat kesepakatan mengenai hari baik untuk dilakukan upacara perkawinan, maka Ida Ayu Ketut Suwen diboyong ke rumah mempelai laki-laki untuk kemudian dilakukan upacara *beakawon* dan dilanjutkan dengan upacara *Widi Wedana*. Beberapa hari kemudian dilakukan upacara *Mejauman* atau *Metipatbantal* yaitu mempelai wanita pulang ke rumah asalnya dengan ditemani mempelai laki-laki beserta keluarganya untuk *mepamit* atau mohon diri kepada para leluhurnya. Dari perkawinan mereka kemudian lahir dua orang anak yang bernama Ida Ayu Putu Rai dan Ida Bagus Lotring. Empat tahun setelah perkawinan mereka, Ida Bagus Pandu meninggal karena sakit sehingga beban kehidupan rumah tangga ditanggung sendiri oleh Ida Ayu Ketut Suwen. Ida Ayu Ketut Suwen memilih untuk tetap tinggal di rumah almarhum suaminya mengingat dia telah memiliki *sentana* di keluarga suaminya. Karena merasa tidak mampu sendirian untuk mengurus anak-anaknya yang masih di bawah umur, maka Ida Ayu Ketut Suwen berkeinginan mencari figur seorang ayah

untuk melindungi dan membina anak-anaknya yang masih kecil. Melihat hal tersebut maka adik almarhum Ida Bagus Pandu yang bernama Ida Bagus Ketut Oma yang masih berstatus bujangan berkeinginan untuk mengawini Ida Ayu Ketut Suwen guna meringankan beban yang ditanggungnya. Perkawinan mereka disetujui dan didukung penuh oleh keluarga kedua belah pihak.

Pada tahun 1964 perkawinan antara Ida Bagus Ketut Oma dengan Ida Ayu Ketut Suwen dilaksanakan. Bentuk perkawinan mereka merupakan bentuk perkawinan mengganti, karena Ida Bagus Ketut Oma menggantikan kedudukan almarhum kakaknya menjadi suami Ida Ayu Ketut Suwen. Proses pelaksanaan perkawinan mengganti/*Nganten Mesalin Tikeh* antara Ida Bagus Ketut Oma dengan Ida Ayu Ketut Suwen terdapat perbedaan dari proses perkawinan yang pertama antara Ida Ayu Ketut Suwen dengan almarhum suaminya. Dalam perkawinan yang kedua ini pelaksanaan upacara perkawinannya lebih sederhana dan tidak selengkap dengan proses perkawinan yang pertama, dimana rangkaian upacara yang dilaksanakan yaitu upacara *beakawon* dan upacara *widi wedana*, sedangkan upacara *mejauman* atau *metipatbantal* tidak lagi dilakukan karena mempelai wanita telah berada di rumah keluarga mempelai laki-laki. Namun dari perkawinan mengganti ini mempunyai kelebihan dimana kedua mempelai memohon restu kepada almarhum suami dari Ida Ayu Ketut Suwen agar dalam perkawinannya yang kedua ini diberikan keselamatan dan kebahagiaan, yang pada saat itu dilaksanakan di *pemrajan* karena almarhum Ida Bagus Pandu telah diabenkan. Adapun upacara yang dilakukan tersebut disebut dengan upacara

*Mapegat Sot.* Dalam perkawinan tersebut juga dihadiri oleh saksi-saksi seperti sanak saudara dari kedua belah pihak, pemangku, bendesa adat dan kelian adat.

Mengenai harta guna kaya yang diperoleh Ida Ayu Ketut Suwen dengan almarhum suaminya yang pertama tidak diwarisi oleh suaminya yang kedua, melainkan harta guna kaya tersebut digabungkan menjadi satu dengan harta guna kaya yang diperoleh dalam perkawinan yang kedua mengingat pada saat itu anak-anaknya masih dibawah umur. Sampai saat ini, setelah anak-anaknya dewasa harta guna kaya tersebut masih tetap digabungkan menjadi satu dan anak-anaknyapun tidak mempermasalahkan penggabungan harta guna kaya tersebut.

## **B. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Mesalin Tikeh Pada Masyarakat Desa Adat Selemadeg**

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata merupakan suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga, tetapi juga memiliki arti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Dengan terjadinya perkawinan, maka diharapkan agar dari perkawinan itu didapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat menurut sistem kekeluargaan yang dianut.

Pada masyarakat Bali yang masyarakatnya menganut sistem kekeluargaan patrilineal (garis keturunan bapak), yang dimaksud dengan masyarakat hukum patrilineal adalah :

1. masyarakat hukum yang berdasarkan atas atau menarik garis keturunan hanya melalui garis bapak atau pihak laki-laki saja.
2. semua yang termasuk keluarga dalam arti ikatan hukum kekeluargaan adalah garis bapak/keturunan bapak.
3. dalam perkawinan istri masuk ke dalam keluarga suami dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah menjadi keluarga bapak.

4. istri putus hubungan hukum dengan keluarga asalnya.
5. hak dan kewajiban baik dilihat dari hukum perkawinan, keluarga dan hukum waris terletak di tangan garis keturunan keluarga bapak, termasuk dalam hubungannya dengan masyarakat.<sup>39</sup>

Sehingga penerus keturunan ada di pihak laki-laki yang disebut dengan *Purusa*, sedangkan perempuan disebut dengan *Pradana*. Konsep *Purusa* dan *Pradana* ini bermakna jiwa dan raga, dimana jiwa itu menghidupi dan raga itu dihidupi.<sup>40</sup>

Dalam masyarakat Hindhu di Bali ada empat (4) tahap kehidupan yang sekarang masih dilakukan namun sudah dimodifikasi sesuai dengan desa, kala patra yaitu tempat, waktu dan keadaan. Keempat tahapan hidup tersebut disebut dengan *Catur Warga*. Adapun tahapan-tahapan tersebut antara lain :

Tahap pertama adalah *Brahmacari* yaitu tahap belajar atau menuntut ilmu.

Tahap kedua adalah *Grhasta* yaitu tahap berakhirnya masa menuntut ilmu yang kemudian menuju kepada kehidupan yang baru yaitu berumah tangga.

Tahap ketiga adalah *Wanaprasta* yaitu meninggalkan keluarga yang sudah mapan untuk bertapa di hutan (wana), melepaskan diri dari kehidupan keluarga.

---

<sup>39</sup> IGN Sugangga, Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem patrilineal Di Indonesia, Semarang, 1988, Hlm 15-16

<sup>40</sup> Bali Post, 20 April 2002, Hlm 9



Tahap keempat adalah *Sanyasin* yaitu setelah bertapa dengan hasil gemilang ia harus mengembara ke desa-desa untuk menyebarkan ilmu kerohanian yang didapatkannya sewaktu bertapa itu dan tidak boleh tinggal di suatu desa lebih dari satu minggu.<sup>41</sup>

Sebelum lahirnya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Undang-undang Pokok Perkawinan, semua perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat yang beragama Hindhu di Bali didasarkan kepada hukum adat yang berlaku di suatu daerah lingkungan masyarakat adat dan sebagian lagi didasarkan atas hukum agama Hindhu. Berkenaan dengan masalah hukum agama itu sendiri belum banyak dikenal oleh masyarakat. Untuk dapat mengetahui proses pertumbuhan hukum Hindhu yang dewasa ini sebagian besar diserapi menjadi hukum adat perlu diketahui latar belakang masalah perkembangan hukum Hindhu di Indonesia.

Bagi masyarakat Hindhu di Bali masalah perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang khusus dalam dunia kehidupan mereka. Perkawinan sebagaimana terdapat di dalam berbagai sastra dan Kitab Hukum Hindhu ( Smerti) dikenal dengan nama *Wiwaha*.

Wiwaha sebagai Dharma adalah suatu ritual yang memberikan kedudukan sah tidaknya suatu perkawinan menurut hukum Hindhu. Menurut ajaran Manusmerti, suatu perkawinan yang tidak disakralkan dianggap tidak mempunyai akibat hukum kepada perkawinan itu sendiri.

---

<sup>41</sup> Rai Sudharta, Manusia Hindhu Dari Kandungan Sampai Perkawinan, Yayasan Dharma Narada, Cet I, 1993, Hlm. 71

Sebagai akibat dari adanya Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sahnya perkawinan Hindhu harus menurut agama Hindhu.

Di dalam masyarakat Hindhu, apabila kita amati ada 3 tahapan dalam upacara perkawinannya yaitu :

a. Upacara pendahuluan

Upacara pendahuluan ini ada yang menyebutkan dengan istilah *Beakawon* atau juga dengan istilah *Mekalan-kalan*. Upacara ini dilakukan oleh seorang rohaniawan yang disebut *pemangku*. Fungsi dari upacara ini adalah agar kedua mempelai dapat dihilangkan *sebel kandelnya* (pengaruh hawa negatif) sehingga wajar untuk dilanjutkan upacara lainnya.

b. Upacara Pokok

Upacara pokok ini sering disebut dengan upacara *Widi Wedana*. Upacara ini biasanya dilakukan pada saat hari yang berbeda dengan upacara *Beakawon* tetapi dapat juga dilakukan pada hari yang bersamaan. Upacara ini dilaksanakan oleh seorang pendeta (Pedanda) dimana upacara ini merupakan upacara penutup baik secara adat, agama maupun sosial kemasyarakatan dimana kesucian dan kesahan perkawinan tidak dapat diragukan walaupun upacara lanjutan tersebut di bawah (c) tidak ada lagi.

c. Upacara lanjutan

Upacara ini ada kalanya dilakukan lama setelah upacara *Widi Wedana* namun kadang-kadang dilakukan pada hari yang bersamaan.

Dalam upacara ini si mempelai wanita *mepamit* kepada leluhurnya dengan cara membawa *gagapan* atau *tipat bantal* (oleh-oleh) yang kemudian dipersembahkan di sanggah/merajan si mempelai wanita. Upacara ini secara agama bertujuan untuk lebih meningkatkan nilai kesucian atau meningkatkan nilai kesusilaan hubungan perbesanan antara pihak keluarga wanita dengan pihak keluarga laki-laki.<sup>42</sup>

Pada proses perkawinan pertama antara Ida Ayu Ketut Suwen dengan Ida Bagus Pandu dilakukan dengan cara memadik/meminang, dimana sesuai dengan hasil penelitian kiranya tidak jauh berbeda dengan proses meminang dalam melakukan peminangan sebagaimana halnya adat dan kebiasaan yang berlaku di Desa Adat Selemadeg, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Bali. Utusan dari mempelai laki-laki datang membawa sesajen yang disebut *Tetampian* yang isinya : sirih, pinang, kapur dimana hal ini dilambangkan sebagai saksi pembicaraan kedua belah pihak. Apabila telah disepakati oleh kedua belah pihak maka ditentukan hari penjemputan si mempelai wanita yang dilangsungkan oleh

---

<sup>42</sup> Wawancara, Ida Pedanda Gede Manu, Giria Jaksa Tabanan-Bali, 3 Agustus 2003

pihak laki-laki dan ditentukan pula kapan upacara dilakukan oleh pihak laki-laki, karena perkawinan itu merupakan suatu bentuk perkawinan jujur. Pada saat dilakukan upacara *Widi Wedana* ini biasanya dihadiri oleh pemuka masyarakat, antara lain : Bendesa Adat, Kelian Dinas dan juga keluarga/kerabat kedua mempelai. Kehadiran pemuka-pemuka masyarakat dalam upacara ini adalah sebagai saksi didalam terjadinya peristiwa perkawinan ini. Upacara selanjutnya adalah upacara Mejauman, dimana ada kalanya upacara ini dilakukan lama sesudah upacara Widi Wedana, tetapi kadang-kadang ada juga yang dilakukan pada hari yang bersamaan. Setelah upacara Widi Wedana selesai, kedua mempelai datang ke rumah mempelai wanita membawa gapgapan (oleh-oleh) berupa sesajen yang kemudian dipersembahkan di sanggah atau merajan mempelai wanita. Pada saat inilah mempelai wanita mepamit/mohon diri kepada leluhurnya.<sup>43</sup>

Namun dalam pelaksanaan perkawinan mengganti (Mesalin Tikeh) yang dilakukan oleh Ida Ayu Ketut Suwen dengan Ida Bagus Ketut Oma karena mempelai wanita sudah berada di rumah mempelai laki-laki, maka proses perkawinan yang kedua ini dapat dikatakan hampir sama pelaksanaannya dengan perkawinan yang pertama hanya saja pada perkawinan yang kedua ini tidak selengkap pada perkawinan yang pertama. Karena mempelai wanita sudah berada di rumah keluarga mempelai laki-laki maka upacara yang dilakukan adalah upacara

---

<sup>43</sup> Wawancara, Jero Mangku Dalem, Desa Selemadeg Tabanan-Bali, 3 Agustus 2003

*Beakawon* dan upacara *Widi Wedana* saja, sedangkan upacara lanjutan tidak lagi dilaksanakan, karena upacara lanjutan ini pada prinsipnya bermaksud melepaskan mempelai wanita dari ikatan leluhur asalnya dan hal ini sudah dilakukan pada perkawinan yang pertama. Di dalam upacara perkawinan mesalin tikeh ini diadakan suatu bentuk upacara yang dilakukan di rumah mempelai laki-laki dimaksudkan untuk memberitahukan kepada almarhum suaminya secara niskala bahwa jandanya sudah dikawini saudaranya, sehingga dalam perkawinannya yang kedua ini mendapatkan keselamatan. Pelaksanaan upacara ini dilakukan di *sanggah kemulan* bila almarhum sudah diabenkan, dan bila belum diabenkan maka upacara dilakukan di *Bale Gede*. Upacara ini disebut dengan upacara *Mapegat Sot*.

Jadi apabila kita lihat dari uraian di atas tentang tata cara perkawinan mengganti atau *Mesalin Tikeh* maka ditegaskan bahwa status perkawinan mengganti ini adalah merupakan bentuk perkawinan biasa dan agak berbeda dengan perkawinan yang pertama karena dalam perkawinan yang kedua ini si istri sudah berada di rumah suami. Upacara perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat dan agama Hindhu di Bali merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan status seseorang dalam hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan.

Jika seorang istri yang menjanda karena tidak ditinggal mati oleh suaminya, melainkan dia menjanda karena diceraikan oleh suaminya, begitu si istri diceraikan oleh suaminya maka si istri harus dipulangkan ke

rumah asalnya tanpa berhak menuntut harta apapun kecuali harta bawaan yang dijadikan bekal pada saat dilangsungkannya perkawinannya terdahulu. Apabila kemudian si janda tersebut dinikahi oleh saudara laki-laki bekas suaminya maka tata cara pelaksanaan upacara perkawinan yang berlaku adalah tata cara perkawinan pada umumnya yang terjadi pada masyarakat Bali dimana diawali dengan proses meminang dan jika telah ditetapkan hari baiknya kemudian dilanjutkan dengan upacara pendahuluan berupa upacara *beakawon* yang dilanjutkan dengan upacara *Widi Wedana* dan upacara *Mejauman* atau *Metipatbantal*. Proses perkawinan semacam ini tidak dapat digolongkan ke dalam perkawinan mengganti atau perkawinan *Mesalin Tikeh* karena perkawinan *Mesalin Tikeh* hanya terjadi apabila seorang istri menjadi janda karena ditinggal mati oleh suaminya.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Wawancara, I.B Sutama M, Bendesa Adat Desa Selemadeg, 20 Agustus 2003

**C. Pengaturan Harta Guna Kaya Dalam Perkawinan Mesalin Tikeh di Desa Adat Selemadeg**

Terjadinya hak milik salah satunya diakibatkan oleh terjadinya suatu perkawinan. Hal ini disebutkan di dalam *Manawadharmastra* X.115 yaitu :

Ada 7 cara yang sah dalam memperoleh hak milik, yaitu pewarisan, perjumpaan atau hadiah, persahabatan, penaklukan, peminjaman dengan bunga, melakukan pekerjaan atau menerima hadiah dari orang yang salah.

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan dalam Pasal 35 Ayat 1 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan dalam ayat 2 dinyatakan bahwa harta bawaan masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah perkawinan ataupun warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain

Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta perkawinan adalah :

Semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah. Kesemuanya itu dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut masyarakat setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri yang bersangkutan.

Sedangkan menurut hukum adat Bali, yang dimaksud dengan harta warisan adalah dapat berupa benda-benda materiil yang dapat dibagi-bagi antara ahli waris. Disamping itu ada juga warisan yang tidak mungkin

untuk dibagi-bagi, tetapi banyak diteruskan kepada ahli warisnya, misalnya : sanggah/pemerajan atau tempat pemujaan keluarga dengan segala kewajibannya.

Sejalan dengan sistem kekerabatan yang dianut di Bali yaitu Patrilineal (purusa) maka menjadi kewajiban anak laki-lakilah untuk melanjutkan segala kewajiban tersebut. Sedangkan yang namanya anak perempuan begitu melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain saat itu pula dia telah melepaskan diri dari ikatan keluarga asalnya, untuk kemudian luluh kedalam keluarga suaminya.

Pada masyarakat Bali yang menganut sistem perkawinan patrilineal maka mengenai harta guna kaya pengurusannya dilakukan oleh pihak suami. Tetapi apabila suami meninggal, maka pengurusan terhadap harta guna kaya ini diurus oleh si istri sebagai janda apabila si janda tetap melaksanakan dharmanya sebagai janda.

Menurut Pasal 2 dari Peswara Hukum Waris di Bali bahwa si istri setelah wafatnya suami berkewajiban mengurus harta peninggalan suaminya dan ini hanya berlaku apabila tidak ada seorang anak laki-laki yang sudah dewasa (termasuk juga seorang anak sentana) dan si janda melakukan pengurusan harta peninggalan suaminya dengan bantuan seorang laki-laki dewasa yang terdekat dalam garis laki-laki (purusa) almarhum suaminya sebagai wali dari anak-anak mereka.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Ibid, hlm 11



Pada prinsipnya, wanita Bali yang beragama Hindhu dianggap tidak patut untuk menuntut pembagian warisan. Tetapi dalam hal-hal tertentu dia dimungkinkan mendapatkan warisan. Demikian pula halnya dengan laki-laki. Pada dasarnya laki-laki dianggap patut untuk menerima harta warisan, tetapi dalam hal-hal tertentu dia tidak dimungkinkan untuk menuntut warisan. Wanita Bali berhak atas harta warisan, apabila statusnya telah disamakan dengan laki-laki. Misalnya, dalam suatu keluarga yang tak satupun terdapat anak laki-laki, maka salah seorang anaknya, biasanya yang paling besar akan ditetapkan sebagai anak laki-laki untuk meneruskan segala kewajiban orang tuanya. Dalam hal ini dia berhak atas warisan orang tuanya.

Anak merupakan penerus keturunan, maksudnya adalah bahwa keberadaan anak dalam suatu keluarga mempunyai fungsi untuk meneruskan generasi dari keluarganya sehingga keluarga tersebut tidak punah. Keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya adanya hubungan darah antara orang yang seorang dengan orang yang lain. Dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan pendapat Gede Pudja mengenai sistem kewarisan bahwa dalam suatu keluarga yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang paling berhak sebagai ahli

waris di dalam suatu keluarga adalah anak laki-laki yang terlahir dari suatu perkawinan yang sah dari si pewaris.<sup>46</sup>

Bedasarkan hasil wawancara dengan Ida Bagus Regeg selaku pemuka agama Desa Selemadeg, tanggal 5 Mei 2003 mengatakan bahwa suami yang kedua dari perkawinan mesalin tikeh ini bukan ahli waris dari harta perkawinan yang ditinggalkan khususnya harta guna kaya yang diperoleh istrinya dari perkawinannya yang pertama, karena yang paling berhak untuk mewarisi harta perkawinan khususnya harta guna kaya adalah anak laki-laki yang terlahir dari perkawinan yang pertama tersebut. Sehingga dengan demikian kedudukan suami yang kedua ini sama kedudukannya dengan janda tersebut terhadap harta perkawinan khususnya harta guna kaya peninggalan suaminya yang pertama, dimana mereka hanya berhak memakai, menikmati dan berkewajiban untuk mengurus harta tersebut. Bahwa sesuai dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat Hindhu di Bali yaitu sistem kekeluargaan patrilineal maka anak laki-lakilah yang paling berhak untuk mewarisi harta tersebut<sup>47</sup>.

Terhadap harta perkawinan khususnya harta guna kaya yang digabungkan dari perkawinan yang pertama dengan perkawinan yang kedua dapat saja dilakukan atas dasar persetujuan antara suami istri

---

<sup>46</sup> Gede Pudja, Hukum Kewarisan Hindhu Yang Direvisi Kedalam Hukum Adat Di Bali Dan Lombok, Cet.I, 1977, hlm. 51

<sup>47</sup> Wawancara, I.B.Regeg, Pemuka Agama Desa Selemadeg, 2 Agustus 2003

tersebut serta anak-anak dari perkawinan yang pertama, asalkan dikemudian hari tidak akan menimbulkan pertentangan. Penggabungan harta perkawinan khususnya harta guna kaya di dalam perkawinan mesalin tikeh ini tidak akan mengubah status dari anak laki-laki sebagai ahli waris dari suatu keluarga dengan sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Hindhu di Bali. Demikian pula terhadap harta perkawinan khususnya harta guna kaya yang telah dipisahkan sejak dilangsungkannya perkawinan mesalin tikeh ini dapat dikatakan suatu tindakan yang paling tepat, karena tindakan tersebut akan dapat memperjelas sejauh mana hak anak-anaknya nanti terhadap harta warisan yang akan diterimanya baik anak yang dilahirkan dari perkawinan mesalin tikeh maupun anak yang terlahir dari perkawinan yang pertama.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan atas uraian dari bab-bab terdahulu di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Tata cara perkawinan mengganti (*Nganten Mesalin Tikeh*) pada masyarakat Bali pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan perkawinan pada umumnya yang dilakukan oleh masyarakat Bali. Perkawinan si janda dengan saudara almarhum suaminya dapat dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada tata cara atau proses perkawinan sesuai dengan hukum adat setempat. Namun dalam pelaksanaan perkawinan mengganti ini prosesnya lebih sederhana dan tidak selengkap pada perkawinan yang pertama. Di dalam perkawinan mengganti ini ada satu upacara yang harus dilakukan oleh kedua mempelai yang disebut dengan *Mapegat Sot* yaitu memohon ijin kepada mendiang suami si janda bahwa jandanya telah dinikahi oleh saudara almarhum suaminya si janda tersebut.
2. Pengaturan harta guna kaya di dalam perkawinan mengganti (*Nganten Mesalin Tikeh*) pada masyarakat Bali, dimana harta guna kaya tersebut diwarisi oleh anak laki-laki yang lahir dari perkawinan yang pertama dan biasanya anak laki-laki yang tertua

sesuai dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat Bali yaitu Patrilineal (purusa). Sedangkan si janda dan suaminya yang kedua tidak berhak mewarisi harta guna kaya tersebut. Apabila di dalam perkawinan tersebut tidak ada seorangpun anak laki-laki maka anak perempuan berhak untuk mewarisi harta guna kaya tersebut dengan mencari seorang suami yang mau dijadikan sebagai penerus keluarga si perempuan tadi (Nyentana).

## B. Saran-saran

Berdasarkan atas uraian penulis pada bab terdahulu dan juga kesimpulan yang dapat penulis tarik, akhirnya sampailah kepada saran-saran, dimana saran-saran yang penulis sampaikan ini diharapkan berguna baik bagi warga masyarakat Desa Selemadeg pada khususnya, masyarakat Bali pada umumnya, dan akhirnya kepada Bangsa Indonesia tercinta ini.

Adapun saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi warga masyarakat Desa Selemadeg, oleh karena sepanjang penelitian penulis belum ada awig-awig tertulis yang mengatur tentang perkawinan mengganti/Mesalin tikeh, maka menurut penulis dipandang perlu untuk dibuatkan/disuratkan ke dalam awig-awig desa atau banjar yang khusus mengatur tentang perkawinan mengganti tersebut.
2. Mengenai pengaturan harta guna kaya di dalam perkawinan mengganti (*Nganten Mesalin Tikeh*) yang kemudian dijadikan

sebagai harta warisan, untuk tercapainya suatu kepastian hukum serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka di sini penulis sarankan untuk dibuatkan suatu surat yang berbentuk surat otentik atas nama ahli waris yang diketahui oleh pihak yang berwenang.

## Daftar Pustaka

- Astiti T. I. P, 1981, *Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Agama Hindu di Bali*, Biro Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum dan pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, Denpasar.
- \_\_\_\_\_, dkk, 1984, *Hukum adat II (bagian II)*, Biro Dokumentasi dan Publikasi Fakultas hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Benny Wayan, 1990, *Hukum Adat Dalam Undang-undang perkawinan Indonesia, (UU No.1 Tahun 1974)*, Cet. II, Biro Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, Denpasar
- Bushar Muhammad, 1965, *Pokok-pokok Hukum adat*, CV. Muliasari, jakarta.
- Djaren Saragih, 1980, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Cet. I, Tarsito, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1983, *Hukum perkawinan Adat*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1987, *Hukum kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1995, *Hukum Perkawinan adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Imam Sudiyat, 1978, *Hukum Adat Sketsa Azas*, Cet I, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 142.
- Kaler I Gusti Ketut, 1983, *Butir-butir Tercecer Tentang Adat Bali*, Bali Agung, Denpasar.
- \_\_\_\_\_, 1983/1984, *Perkawinan Hukum Hindu (didasarkan Manusmerti)*, ttp., Denpasar.
- Kaleran AAN, dkk, 1963, *Hukum Perkawinan Secara Adat dan Agama Hindu di Bali*, ttp., Denpasar.
- Korn V.E. Terjemahan I Gede Wayan Pangkat, 1972, *Hukum waris Adat di Bali*, Fakultas Hukum dan pengetahuan masyarakat Universitas Udayana, Denpasar.
- K. R. M. H. Suropto, 1979, *Hukum Adat Waris Bali*, Cet II, F. Hk. Univ. Negeri Jember.
- Mardalis, 1989, *Metodologi Suatu Pendekatan Proposal*.
- Nasution S., 1992, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Tarsik, Bandung.

Pudja Gede, 1977, *Apakah Hukum Itu(pokok-pokok pemikiran tentang hukum hindu)*, Mayasari, jakarta.

\_\_\_\_\_, 1977, *Hukum Kewarisan Hindu yang Direvisi Kedalam Hukum Adat di Bali dan Lombok*, Cet. I, ttp., Denpasar.

\_\_\_\_\_, 1983/1984, *Pengantar tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu (didasarkan Manusmerti)*, Mayasari, Jakarta.

R. Soebakti, 1974, *Pokok-pokok Hukum perdata*, Internusa, jakarta.

Ronny Hanitiso Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Graha Ind., Jkt.

Rai Sudiarta, 1993, *Manusia Hindhu Dari Kandungan Sampai Perkawinan*, Yayasan Dharma Narada, Cet I.

Sajuti Talib, 1983, *Hukum Keluarga Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Hakarta.

Soerojo Wignjodipoero, 1983, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.

Soeryono Soekanto, 1980, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung.

Sulatri Hidayah, 1997, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*, PT. Pustaka 1P3 ES, IKAPI.

Ter Haar Bzn. Terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto, 1976, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Wayan Windia, 1995, *Menjawab Masalah Hukum*, Cet I.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang perkawinan.